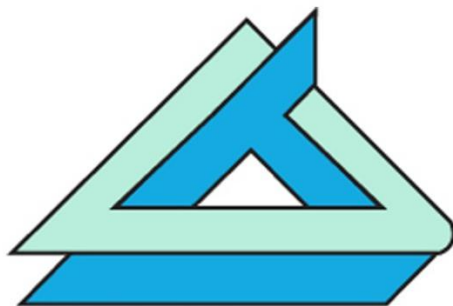


---

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
TAHUN 2017

---



---

PT. BPR ANUGERAH ARTASENTOSA PRIMA  
18 APRIL 2018

---

## Table of Contents :

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	3
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	4
Frekuensi dan Materi Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2017 .....	4
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi .....	5
Transparansi Hubungan Keuangan atau Keluarga Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham .....	5
Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.....	5
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	5
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite .....	6
Penanganan Benturan Kepentingan.....	6
Transaksi Yang Memiliki Benturan Kepentingan .....	6
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern .....	7
Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	8
Keterangan Penyimpangan Intern yang Terjadi di Tahun 2017 .....	8
Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	9
Rencana bisnis BPR .....	9
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	9
Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh BPR di tahun 2017 .....	10
Rincian Pemberian/Penerimaan dana dari organisasi sosial ataupun politik .....	10
Lembar Pengisian Self Assessment : Penerapan Tata Kelola.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR .....	11

## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Pada akhir tahun 2017, BPR memiliki 2 anggota Direksi yang bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR dan sudah lulus Sertifikasi Direksi. Susunan Direksi di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Direktur Utama	Hanny Santoso	17 Oktober 2016 sampai 17 Oktober 2021
Direktur	Khoe Kwok Tjhong	17 Oktober 2016 sampai 17 Oktober 2021

- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi atau Dewan Komisaris.
- Di tahun 2017, Direksi menggunakan penyedia jasa profesional dalam rangka melakukan Audit Laporan Keuangan tahun 2016 yaitu Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, dan dalam rangka pengadaan website BPR yaitu PT. Inspirasi Digital Eksperiensia. Kedua kerja sama tersebut telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, jangka waktu pekerjaan dan biaya.
- Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, auditor ekstern dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus meningkatkan efisiensi dan tata kelola.
- Direksi telah membuat dan mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada BPR.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi telah melakukan peningkatan pengetahuan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan perbankan.

Nama Direksi	Tanggal dan Penyelenggara	Tema
Hanny Santoso	14 September 2017, CV Meta Dinamika	"Melaksanakan Tugas Pejabat APU-PPT, Kepatuhan & Manajemen Risiko"
	25 September 2017, CV Meta Dinamika	"Struktur Upah & Remunerasi BPR"
Khoe Kwok Tjhong	16 Desember 2017, PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima dan PT. BPR Dana Usaha	"Anti Pencucian Uang—Pencegahan Pendanaan Terorisme" dengan Bapak Lukas Sulaiman Muliawan

## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Sampai akhir tahun 2017, BPR memiliki 2 anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
- Di tahun 2017, Dewan Komisaris terdiri dari Bapak Lie Heryanto dan Ibu Felicia Heryanto dimana terdapat hubungan keluarga. Namun, pada tahun 2018, BPR sudah mengangkat Ibu Pelita Yanti sebagai Komisaris sejak tanggal 14 Maret 2018 sehingga tidak ada lagi hubungan keluarga diantara pejabat Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil audit Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
- Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali di dalam tahun 2017. Tidak terdapat dissenting opinion di rapat dewan komisaris yang dilakukan di tahun 2017.
- Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada BPR.
- Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
- Susunan Dewan Komisaris di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Komisaris Utama	Lie Heryanto	17 Oktober 2016 sampai 17 Oktober 2021
Komisaris	Felicia Heryanto	17 Oktober 2016 sampai 17 Oktober 2021

## Frekuensi dan Materi Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2017

No.	Tanggal	Daftar Hadir	Materi Rapat
1.	15 Desember 2017	Lie Heryanto Felicia Heryanto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan penggantian personel Dewan Komisaris</li> <li>2. Pemasangan System Disaster Recovery Center (DRC sesuai dengan POJK no. 4 tahun 2015)</li> <li>3. Penambahan anggota Direksi untuk membawahi bagian kepatuhan</li> </ol>
2.	15 September 2017	Lie Heryanto Felicia Heryanto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi Rencana Kerja Semester 1 2017</li> <li>2. Kegiatan Literasi Edukasi</li> <li>3. Pelatihan APU-PPT bagi seluruh karyawan</li> </ol>
3.	15 Juni 2017	Lie Heryanto Felicia Heryanto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permodalan BPR Triwulan II</li> <li>2. Penanggulangan NPL BPR</li> <li>3. Pengembangan SDM</li> </ol>
4.	31 Maret 2017	Lie Heryanto Felicia Heryanto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan BPR Triwulan I 2017</li> <li>2. Perputaran Kredit BPR</li> </ol>

## Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Nama	Kepemilikan Saham pada PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima
<b>Dewan Komisaris</b>	
Lie Heryanto	40% atau 2.000 lembar saham
Felicia Heryanto	-
<b>Direksi</b>	
Hanny Santoso	20% atau 1.000 lembar saham
Khoe Kwok Tjhong	-

## Transparansi Hubungan Keuangan atau Keluarga Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>Dewan Komisaris</b>												
Lie Heryanto	√			√	√			√		√		√
Felicia Heryanto	√			√	√			√		√		√
<b>Direksi</b>												
Hanny Santoso		√		√		√		√		√		√
Khoe Kwok Tjhong		√		√		√		√		√		√

## Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) Dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah Pejabat (Per tanggal 31 Desember 2017)	2	2
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	262.440.000	423.687.500

## Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Catatan	Rasio
Pegawai Tertinggi – Pegawai Terendah	2.98
Direktur Tertinggi – Direktur Terendah	1.06
Komisaris Tertinggi – Komisaris Terendah	1.29
Direksi Tertinggi – Komisaris Tertinggi	1.50
Direksi Tertinggi – Pegawai Tertinggi	1.65

\*menggunakan nilai Gaji Pokok dan uang kehadiran per bulan Desember 2017 dengan hitungan 1 bulan= 20 hari (kecuali Honor Dewan Komisaris)

## Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

- Karena BPR tidak memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah), maka BPR tidak memiliki komite audit maupun komite pemantau risiko.

## Penanganan Benturan Kepentingan

- BPR memiliki sistem untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada BPR, salah satunya adalah penetapan BMPK yang lebih konservatif untuk pemberian kredit kepada pihak terkait. Selama tahun 2017, belum ada pencairan kredit kepada pihak terkait.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
- Selama tahun 2017, tidak ada benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian pada BPR.

## Transaksi Yang Memiliki Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1.	Lie Heryanto, Komisaris Utama dan Pemegang Saham	Hanny Santoso & Khoe Kwok Tjhong, Direksi	Kelanjutan penyewaan gedung kantor di Jl. Mangga Besar VIII no 3, Tamansari, Jakarta Barat yang adalah milik dari Bapak Lie Heryanto	Rp. 177.777 ribu per tahun	Nilai sewa tersebut adalah nilai sewa yang sebanding dengan pasaran.

## Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

- Di tahun 2017, BPR sudah menunjuk Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern namun belum mengangkat Direktur Kepatuhan. Di tahun 2018, salah satu gol kami adalah untuk mengangkat Direktur Kepatuhan yang akan menangani fungsi kepatuhan independen terhadap bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana.
- BPR sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern.
- Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, serta melakukan reuiu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan ketentuan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
- BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dan kepatuhan.

Nama PE	Tanggal dan Penyelenggara	Tema
Yuni Budi Setyaningsih	11-12 Agustus 2017, Perbarindo	"Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di BPR"
Antonio Wijaya	14 September 2017, CV Meta Dinamika	"Melaksanakan Tugas Pejabat APU-PPT, Kepatuhan & Manajemen Risiko"
Yuni Budi Setyaningsih & Antonio Wijaya	16 Desember 2017, PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima dan PT. BPR Dana Usaha	"Anti Pencucian Uang—Pencegahan Pendanaan Terorisme" dengan Bapak Lukas Sulaiman Muliawan

- Penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2016 telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, serta persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum pun telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Susunan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Audit Intern adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Tanggal Pengangkatan
PE Audit Intern	Yuni Budi Setyaningsih	30 November 2016
PE Kepatuhan	Antonio Wijaya	30 November 2016

## Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan telah melaporkan penunjukannya kepada OJK di tahun 2017.

Jabatan	Nama	Tanggal Pengangkatan
PE Manajemen Risiko	Antonio Wijaya	31 Oktober 2017

- BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif kepatuhan.
- BPR terus melakukan proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang bersifat material, diantaranya risiko kredit dan risiko likuiditas, untuk mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan efisiensi/rentabilitas BPR.
- BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
- BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, termasuk sistem informasi teknologi, untuk mencegah terjadinya penyimpangan intern.

### Keterangan Penyimpangan Intern yang Terjadi di Tahun 2017

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

Tidak ada penyimpangan intern di tahun 2017.



## Batas Maksimum Pemberian Kredit

- BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
- BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
- BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK dalam penyaluran kredit di Tahun 2017, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## Rencana bisnis BPR

- Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR serta memperimbangan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
- Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis dan rencana bisnis tahunan, termasuk rencana literasi edukasi dan inklusi keuangan BPR.
- Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan (bila diperlukan) dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- Telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi teknologi yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR. Selanjutnya, BPR juga menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan penyampaian laporan-laporan tersebut adalah untuk mendukung azas transparansi BPR kepada pemangku kepentingan. BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

- BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sudah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

### Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh BPR di tahun 2017

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses penyelesaian	1	0
Total	1	0

### Rincian Pemberian/Penerimaan dana dari organisasi sosial ataupun politik

Nama Organisasi Sosial/Politik	Jumlah	
	Pemberian Dana	Penerimaan Dana
N/A	0	0

\*Di tahun 2017, belum terdapat pemberian ataupun penerimaan dana untuk kegiatan sosial ataupun politik.

## Kesimpulan Umum Hasil Penilaian (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

<b>Faktor</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>Nilai Komposit</b>
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.267	0.191	0	0.250	0.411	0.223	0.025	0.294	0.075	0.075	0.113	1.924
<b>Predikat Komposit</b>	Baik											

<b>Kesimpulan</b>
<p>Setelah melakukan self-assessment, kami akan memperbaiki beberapa hal termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pergantian Dewan Komisaris*</li> <li>• Menunjuk Direktur Kepatuhan</li> <li>• Membuat Kebijakan Manajemen Risiko</li> <li>• Memiliki PE Kepatuhan yang independen dari fungsi operasional</li> <li>• Membuat dan menerapkan prosedur penanganan benturan kepentingan</li> </ul> <p>*Di awal tahun 2018, telah dilakukan RUPS LB untuk melakukan pergantian Dewan Komisaris sehingga pada saat laporan ini ditulis, posisi Komisaris sudah dijabat oleh Ibu Pelita Yanti yang sudah resmi menjabat</p>

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2017 PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima kami sampaikan,

Jakarta, 18 April 2018

PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima



Hanny Santoso  
 Direktur Utama
 

Lie Hervanto  
 Komisaris Utama